

## **BAB V**

### **UPAYA AIPR UNTUK MENINGKATKAN PERAN PEREMPUAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI ASIA TENGGARA TAHUN 2016-2020**

#### **5.1 Pelibatan Perempuan Dalam Penyelesaian Konflik di Asia Tenggara**

Perempuan sering kali menjadi korban kekerasan dan menerima beban ganda dalam kondisi konflik, namun tak jarang mereka juga menjadi agen penjaga perdamaian, dalam hal ini komitmen negara-negara Asia Tenggara terhadap pelibatan perempuan dalam proses penyelesaian konflik pun tidak tanggung-tanggung. Indonesia sendiri telah memiliki RAN P3AKS (Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial) dan tercatat sebagai *women peacekeepers* atau agen penjaga perdamaian perempuan terbesar ke-7 di dunia dan pertama di Asia Tenggara. Sebagai individu yang rentan, dalam kondisi konflik perempuan dapat dikatakan sebagai *triple* korban.

Perempuan kerap kali mengalami kekerasan dan menerima dampak yang berlipat ganda. Di satu sisi, RAN P3AKS belum cukup dikenal dalam konflik Sumber Daya Alam dan ekstremisme kekerasan, serta masalah lemahnya monitoring RAN P3AKS. Namun RAN P3AKS mampu menginspirasi kerja-kerja masyarakat sipil dalam membangun arsitektur perdamaian tingkat lokal. Selain adanya RAN P3AKS, partisipasi penuh dan pelibatan yang sangat berarti dari perempuan penting bagi proses penyelesaian konflik. Keterlibatan perempuan dalam kemajuan agenda perdamaian dan keamanan memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, terutama di wilayah konflik, *women peacekeepers* dianggap sangat efektif dalam membantu mendorong perdamaian.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI. 2021. *Perempuan Sebagai Agen Perdamaian Mampu Terlibat Dalam Penyelesaian Konflik*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2930/perempuan-sebagai-agen-perdamaian-mampu-terlibat-dalam-penyelesaian-konflik> Diakses 27 October 2021

Perempuan sebagai agen perdamaian sudah banyak terbukti dari upaya perempuan dalam mediasi, negosiasi dan fasilitasi proses perdamaian. Namun demikian, proses perdamaian pada tingkat tinggi umumnya di dominasi oleh pria. Berdasarkan data UN Women, antara tahun 1992-2019, perempuan hanya merepresentasikan 13% dari total negosiator dan 6% dari keseluruhan jumlah mediator. Bahkan 7 dari 10 proses perdamaian sama sekali tidak melibatkan perempuan.

### **5.1.2 Peran Perempuan Dalam Konflik Dan Resolusi Konflik**

Di setiap konflik yang telah terjadi atau sedang berlangsung pasti selalu merugikan negara baik dari segi fasilitas, maupun merugikan bagi masyarakatnya khusus bagi pihak perempuan. Dalam hal ini perempuan selalu menjadi pihak yang mengalami kerugian yang cukup banyak jika ditilik dari berbagai aspek. Perempuan tidak hanya mengalami kerugian dalam hal materiil, namun juga mengalami kerugian fisik dan psikisnya. Kebanyakan perempuan yang menjadi korban atau berada di tengah-tengah sebuah konflik mengalami berbagai kekerasan yang dilakukan baik dari pihak internal konflik tersebut juga dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.

Peran perempuan dalam situasi ini memang sangat minim dan mayoritas cenderung mengarah ke sisi negatif dari konflik tersebut. Mayoritas perempuan yang berada di dalam suatu wilayah konflik menjadi korban baik itu dilakukan oleh pihak lawan maupun pihak mereka sendiri. Para perempuan kerap kali dijadikan sebagai tawanan oleh pihak lawan, hal ini dilakukan agar apa yang menjadi keinginan dari pihak lawan tersebut dapat direalisasikan oleh pihak lawan. Tidak jarang sekelompok perempuan yang dijadikan tawanan oleh pihak lawan ini terpaksa harus berakhir dengan sebuah penyiksaan berupa kekerasan, pemerkosaan bahkan pembunuhan terhadap pihak perempuan tersebut.

Sejak jaman dahulu, perempuan juga kerap kali dijadikan sebagai “alat” pemuas bagi pihak yang berperang. Biasanya mereka menjadikan perempuan tersebut untuk memuaskan hasrat mereka. Dalam hal ini, dikarenakan lemahnya perlindungan kejahatan terhadap perempuan-lah membuat berbagai pihak sulit untuk menyelamatkan para perempuan yang menjadi korban tersebut. Selain itu, ruang gerak para perempuan dalam suatu konflik ini juga semakin sempit dan terbatas dengan berbagai norma dan tradisi yang diadopsi oleh kelompok atau negara yang bertikai tersebut. Oleh sebab itu, jumlah korban perang yang merupakan perempuan jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan bagi laki-laki.

### **5.1.3. Kedudukan Perempuan Dalam Prespektif Gender**

Konstruksi gender mengenai pembagian peran, ciri, sifat, posisi, fungsi, serta identitas perempuan dan laki-laki berdasarkan kualitas maskulin dan feminim membuat perempuan mengalami situasi yang tidak menguntungkan. Situasi yang tidak menguntungkan ini sangat erat kaitannya dengan dominasi patriarki sebagai sistem sosial-politik yang menganggap lelaki lebih unggul diatas segala hal. Istilah patriarki sendiri berasal dari bahasa latin (*father/ayah*) dan *arch* (*rule/aturan*) yang berarti “aturan ayah” namun dalam manifestasi perwujudannya saat ini patriarki telah mengalami perluasan makna pada dominasi laki-laki, aturan laki-laki yang berkuasa dikebanyakan instansi sosial, politik, ekonomi dan sebagainya sehingga organisasi, institusi maupun sistem dalam masyarakat menjadi sedemikian rupa mempromosikan supremasi laki-laki.<sup>2</sup>

Dalam hal tersebut peran perempuan sangat terbatas, peranan (*role*) merupakan aspek yang dinamis bagi kedudukan (*status*). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut melaksanakan suatu peran keduanya tidak dapat dipisahkan karena satu dengan lainnya saling tergantung. Artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status

---

<sup>2</sup> Lathiefah Widuri Retyaningtyas, 2018. *Peran Jejaring Feminis Asia Pacific Forum on Women, Law And Development (APWLD) dalam Merepresentasikan Hak Asasi Perempuan*. Depok: Universitas Indonesia

tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang.

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi atau tempat dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (*social position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Sedangkan peran lebih banyak merujuk pada fungsi artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Peran penting tersebut mencakup tiga hal yaitu :

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan
- 3) Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>3</sup>

Pergeseran dan pembagian peran (pembagian kerja) antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan rumah tangga, terjadi seorang ibu mempunyai peran yang sangat penting dalam negara. Di mana peran perempuan tidak hanya untuk dipimpin tetapi juga untuk memimpin. Ketika dimasukkan dalam konsep gender, menurut Sita Van Bummelen paling tidak memiliki dua alasan pertama, ketidakpuasan dengan gagasan statis tentang jenis kelamin. Perbedaan antara wanita dan pria hanya menunjuk pada sosok biologisnya dan karenanya tidak memadai untuk melukiskan keragaman arti pria dan wanita dalam pelabagi kebudayaan. Kedua, *gender* menyiratkan bahwa kategori pria dan wanita merupakan konstruksi manusia yang membentuk pria dan wanita. Namun ironisnya, ditengah gagap gempitanya upaya kaum feminis memperjuangkan keadilan dan kesetaraan *gender*

---

<sup>3</sup> Saptari, Ratna. 1997. *Perempuan, Kerja, dan perubahan Sosial*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafitri

masih banyak pandangan sinis, cibiran, perlawanan yang datang tidak hanya dari kaum laki-laki akan tetapi dari kaum perempuan sendiri. Masalah tersebut muncul mungkin karena ketakutan kaum laki-laki merasa terancam oleh kebangkitan perempuan atau juga muncul dari ketidaktahuan mereka. Kaum laki-laki laki-laki dan perempuan akan istilah *gender* itu sendiri dan apa hakekat dari perjuangan *gender* tersebut.

Konsep *gender* juga menyebabkan terbentuknya stereotipe yang ditetapkan secara budaya atau hal yang umum tentang karakteristik *gender* yang spesifik, berupa karakteristik yang berpasangan yang dapat menggambarkan perbedaan *gender*. Dapat dilihat bahwa hal itu dibentuk saling bertentangan tetapi karakteristiknya saling berkaitan. Contoh laki-laki adalah makhluk yang rasional atau emosional maka perempuan mempunyai karakteristik yang berlawanan. Perubahan karakteristik *gender* antara laki-laki dan perempuan tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat dari kelas ke kelas tertentu misalnya pada suku tertentu perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Pengertian seks dan *gender* tidak sama dengan seks. Seks adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis, yang merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan sehingga sifatnya permanen dan universal. Sedangkan *gender* adalah perbedaan perempuan dan laki-laki yang merupakan bentuk budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan. Perbedaan ini sangat penting karena selama ini kita sering mencampurkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati (seks) dan tidak berubah, dengan ciri-ciri manusia yang non kodrat (*gender*) sebenarnya bisa berubah atau diubah.<sup>4</sup>

Dalam proses sosialnya, hambatan-hambatan terhadap kesetaraan perempuan tersebut telah melahirkan feminisme sebagai kesadaran untuk melawan dominasi patriarki. Feminisme adalah wujud perlawanan dari beragam penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan dalam berbagai konteks yang berangkat dari pengalaman beragam perempuan dalam memahami ketidaksetaraan yang terjadi

---

<sup>4</sup> Rostyaningsi, 2010. *Konsep Gender*. Semarang: LPPM UNDIP

melalui pembangunan kapasitas kelompok dan jaringan untuk menentang kekuasaan hegemoni patriarki. Kelahiran feminisme sebagai salah satu gerakan pembebasan perempuan merefleksikan perubahan struktural dalam kehidupan sebagian besar perempuan. Gerakan feminis berhasil membangun karakter sosial atas situasi kaum perempuan hal ini mendapatkan pengakuan atas kesetaraan *gender* perempuan walaupun, realitanya eksploitasi dan penindasan terhadap perempuan masih tetap berlanjut. Oleh karena itu, kesetaraan keadilan pembangunan dan realisasi hak asasi perempuan hanya dapat terjadi apabila perempuan itu sendirilah yang menjadi penggerak untuk memimpin perdebatan kebijakan dan hukum serta menentukan solusinya. Untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan, keterlibatan perempuan di tingkat akar rumput dan tingkat pembuatan kebijakan diperlukan untuk membawahkan pendekatan feminis dan prespektif terhadap advokasi yang dilakukan.

#### **5.1.4 Perempuan Dalam Mitos Dan Fakta Sejarah**

Dalam studi sejarah filsafat diceritakan bahwa zaman mitologi merupakan awal sejarah manusia, oleh karenanya pembahasan seputar perempuan juga tidak terlepas dari mitos dan fakta fakta sejarah yang melatarbelakanginya. Diduga ada hubungan antara pribadi laki-laki dan perempuan pada era mitologi yang dalam kenyataannya tidak dapat dibuktikan dengan materealisme sejarah. Di luar mataterism sejarah, yang menarik adalah ketika laki-laki dan perempuan hidup dalam satu klan, mereka menghadapi eksistensi keterasingan dalam *totem, mana* dan lingkungan yang dikuasainya, ketika individu terpisah dari komunitasnya, ia membutuhkan penjelmaan pribadi. *Mana* terindividualisasikan dalam sosok sang ketua, kemudian sosok dalam individu. Pada waktu yang bersamaan setiap orang mencoba menguasai aspek tanah dan perlengkapan hasil bumi. Laki-laki menemukan jati dirinya pada benda-benda. Ini karena sebelumnya ia telah dikalahkan oleh benda-benda tersebut. Hal itu dapat dipahami bahwa ia menempatkan benda-benda tersebut sebagai suatu nilainya hampir sama dasarnya dengan kehidupan. Hal itu menyebabkan laki-laki pada hak miliknya menjadi menjadi suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan (identik dengan laki-laki), namun hal tersebut tidak dapat dijelaskan hanya melalui peralatan yang

dikuasainya, tetapi harus dipahami melalui keseluruhan perilaku laki-laki sebagai pengguna alat tersebut dan dipandang sebagai penguasa lingkungan.<sup>5</sup>

Pada masa Yunani Kuno kalangan elit menempatkan perempuan sebagai makhluk tahanan yang terkungkung dalam istana, bagi kalangan bawah perempuan dianggap sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan di pasar. Mereka menganggap perempuan penyebab persengketaan, peperangan, kekacauan dan lambang kekejian. Sejarah juga mencatat nasib perempuan di negeri Jepang bagaikan tahanan rumah. Di Cina dan juga di Eropa perempuan seperti budak yang tidak memiliki hak, demikian juga Persia. Tradisi Arab jahiliyah perempuan nyaris tanpa ada hak sama sekali. Bayi perempuan tidak dibiarkan hidup. Ketika Islam datang, Al-quran memberikan perhatian yang sangat istimewa pada perempuan. Salah satu misi al-quran adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa surah seperti al-baqarah, an Nisa, an Nur dan beberapa surah lainnya. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW.<sup>6</sup>

### 5.1.5 Status Perempuan Dalam Islam

Islam telah menganugerahkan persamaan bagi laki-laki dan perempuan dalam lapangan kehidupan. Islam adalah agama yang sangat memberikan hak yang egaliter antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam laki-laki dan perempuan dapat menikmati hak dan status yang sama, meskipun dalam hal mengisyaratkan perbedaan dalam hak dan kewajiban semata-mata karena pertimbangan unsur natural, biologis, dan psikologis. Dapat dikatakan bahwa Islam memperlakukan perempuan dan laki-laki secara egaliter dalam sebagian besar lapangan kehidupan. Islam memberi tuntutan yang tegas bahwa semua manusia, tanpa membedakan perempuan dan laki-laki diciptakan untuk sebuah misi yang sangat penting, yaitu sebagai khalifah *fil ard* (pemimpin di bumi), paling tidak pemimpin untuk dirinya sendiri. Karena itu perempuan dan laki-laki diharapkan bekerjasama, bahu membahu, gotong royong,

<sup>5</sup> Mufidah CH, 2014. *Paradigmghafa Gender*, Malang: Bayumedia, hlm,20.

<sup>6</sup> Mariah Ulfah dkk, 2003. *Modul Analisis Gender*, Jakarta: Tim LKP2 PP Fatayat NU, hlm

untuk mewujudkan masyarakat yang damai, bahagia, dan sejahtera untuk dalam term Al-quran disebut *baldatun thayyibatun warabbul ghaffar*. Fungsi inilah yang telah dilakukan para aktivitas perempuan dengan kapasitasnya masing-masing baik pada masa konflik, inisiasi dan bahkan masa damai.<sup>7</sup>

Contoh kasus yang di perjuangkan perempuan seperti yang dilakukan *Asia Pacific Forum on Women, Law And Development* (APWLD) mendorong aksi kampanye untuk bergerak bersama dalam meratifikasi ataupun mempopulerkan Undang-undang yang dibutuhkan oleh perempuan. Selain itu (APWLD) juga mengadvokasi kasus-kasus langsung yang berkaitan dengan hukum pembelaan terhadap hak asasi perempuan seperti berikut:<sup>8</sup>

<b>Nama Pembela HAM Perempuan</b>	<b>Negara</b>	<b>Permasalahan kekerasan perempuan secara singkat</b>	<b>Hasil</b>
Imrana jalal	Fiji	Pengacara ternama yang mengkritik Rezim Militer Fiji	Pengadilan membatalkan semua tuduhan
Mary Jane Veloso	Filifina	Perempuan yang dituduh sebagai pengedar narkoba di indonesia dan dijatuhi eksekusi hukuman mati	Eksekusinya dihentikan
Ain O Salish Kendra (ASK) : nama dari organisasi bantuan hukum dan HAM	Banglade sh	Percobaan penculikan terhadap Direktur ASK	Mendapatkan perhatian penegak hukum dalam masalah ini

<sup>7</sup> Musda Mulia, 2014. *Kemuliaan Manusia dalam Islam*, Jakarta: Megawati Institut

<sup>8</sup> Ibid hlm. 5



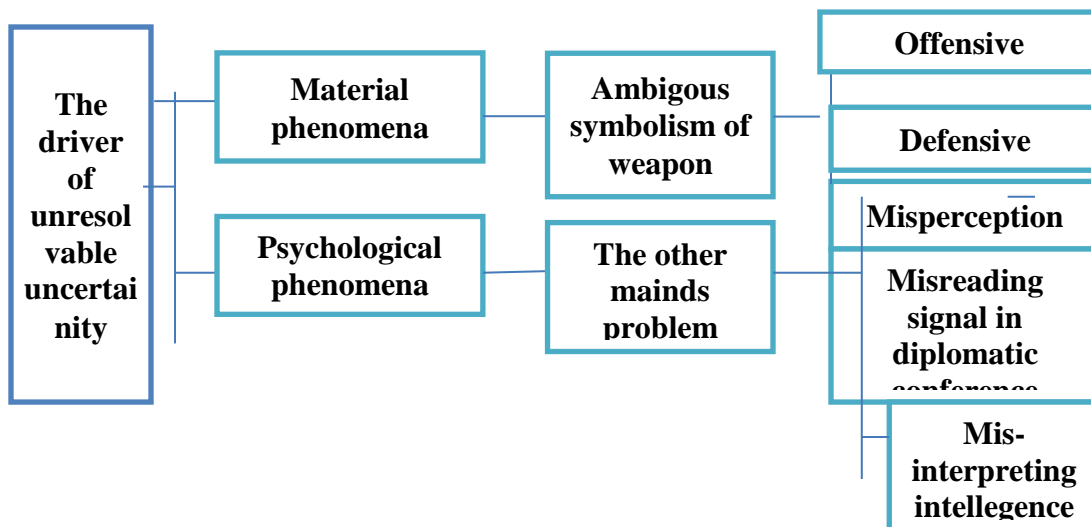
### **5.1.6 Perempuan sebagai Aktor Resolusi Konflik**

Dibalik posisinya yang kerap kali menjadi korban dari terjadinya konflik di suatu wilayah, perempuan juga mampu untuk menjadi agen perdamaian bagi kedua pihak yang terlibat dalam suatu konflik tersebut. Perempuan dapat menjadi pihak yang dapat mewujudkan terciptanya perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Hal tersebut karena perempuan memiliki jalan pemikiran serta cara pengambilan keputusan yang berbeda dengan pihak laki-laki. Perempuan dinilai lebih mampu menjalankan strategi *soft power* dibandingkan pihak laki-laki. Perempuan dengan segala pemikirannya yang disertai juga dengan lemah lembut yang mampu untuk meminimalisir konflik serta mewujudkan terjadinya resolusi konflik. Salah satu contoh bagaimana peran perempuan dalam sebuah resolusi konflik atau peran perempuan sebagai agen pembawa perubahan ini dapat diambil dari kasus yang terjadi di Negara bagian karen yang terletak di Myanmar.

### **5.1.7 Konflik Asia Tenggara**

Kondisi keamanan regional pasca Perang Dingin yang diwarnai ketidakpastian (*uncertainty*) yang kemudian berimplikasi kepada tingginya *security dilemma* di beberapa kawasan dunia. Ketidakpastian ini menurut Ken dan Booth dan Nicholas J. Wheeler yang dapat terjadi karena ada dua hal yaitu dari faktor material dan faktor psikologis. Pertama, ketidakpastian dari faktor material secara jelas merujuk kepada sifat-sifat ambigu dari sistem persenjataan itu sendiri, apakah ofensif atau defensif. Dalam kondisi struktur internasional yang diyakini anarki, pembangunan kapabilitas militer dianggap menjadi respon yang paling rasional atas ketidakpastian tersebut. Sementara di sisi lain, pembangunan kapabilitas militer yang bersedia untuk mencapai keamanan bagi suatu negara dapat dipersepsikan sebagai ancaman bagi negara lain. Disinilah kemudian interpretasi terhadap karakter persenjataan apakah dibangun dalam kerangka ofensif ataupun defensif menjadi sangat krusial.

Kedua, faktor psikologis merujuk kepada apa yang lazim disebut sebagai ‘*the other minds problem*’ yaitu kondisi dimana *decision maker* dari masing-masing negara tidak bisa yakin 100% motif dari negara lain sehingga sangat rentan menimbulkan mispersepsi. Di dalamnya termasuk juga mispersepsi dalam dialog-dialog keamanan dan menginterpretasikan informasi intelejen. Kedua hal ini sangat menentukan tingginya derajat dilema keamanan yang mewarnai dinamika keamanan regional pasca Perang Dingin. Berikut ini model ketidakpastian (*uncertainty*):<sup>9</sup>



Secara sederhana *security dilemma* dapat didefinisikan sebagai :

“*A two level strategic predicament in relations between states and other actor, with each level consisting of two related dilemmas which force decision maker to choose of them*”.

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *security dilemma* adalah dilema keamanan yang mewarnai pola hubungan negara-negara dalam suatu kawasan tertentu yang terdiri dari dua level yaitu *dilemma of interperations*, dan *dilemma response*. *Security dilemma* terjadi karena tidak adanya *mutual trust* antara negara-

<sup>9</sup> Ni Komang Desi Arya Pinatih, 2015. *Stagnasi Confidence Building Measures Sebagai salah satu Instrumen Penyelesaian Konflik di Asia Tenggara Tahun 1994-2014*. Universitas Sriwijaya <https://transformasi.global.ub.ac.id> Diakses pada 28 October 2021

negara dalam suatu kawasan sehingga kondisi ini sangat rentan memicu perlombaan persenjataan (*arms race*) yang kemudian bisa menyebabkan konflik.<sup>10</sup>

### **5.1.8 Motivasi Keterlibatan Aktivistis Perempuan Dalam Membangun Perdamaian.**

Keikutsertaan atau keterlibatan seseorang dalam sebuah perilaku atau tindakan biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai motif. Motivasi adalah pendorong suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar tergerak untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga dapat mencapai hasil dan tujuan tertentu.<sup>11</sup> Menurut Sardiman motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu.<sup>12</sup> Berbicara yang faktor yang memotivasi keterlibatan aktivis perempuan dalam mewujudkan dan memelihara perdamaian dapat di bagi menjadi dua kelompok. Pertama, motif keterlibatan mereka dilatarbelakangi oleh pengalaman traumatis sebagai dampak kekerasan konflik yang mereka alami dan rasakan di lingkungan di tempat tinggalnya pada masa kanak-kanak, sehingga mendorong kuat ekspresi kemanusiaan mereka untuk segera membantu masyarakat yang mengalami masalah terkait konflik. Kedua, aktivis yang tidak memiliki trauma konflik akan tetapi melakukannya atas dasar panggilan kemanusiaan, setelah berhadapan dengan persoalan perempuan dan konflik pada masyarakat yang telah lama mereka dampingi.

Mereka memang orang-orang yang bekerjasama di masyarakat akar rumput untuk pendampingan dan pemberdayaan perempuan. Sehingga ketika kerja sosialnya bersentuhan dengan persoalan konflik. Yang otomatis perempuan merupakan korbannya, maka ini menjadi agenda kemanusiaan yang menuntut mereka untuk membantu dengan segenap kemampuan dan cara. Berikut pengalaman menarik beberapa aktivis perempuan sebagai pemicu tumbuh-kembangnya jiwa semangat juang menjadi aktivis. Mereka mengakui bahwa sejak kecil sudah memperhatikan

---

<sup>10</sup> Naureen Nazar, 2006. *Chronology of Conflict and Cooperation in Southeast Asia Post-Cold War Era*, Area study Center for East and Southeast Asia, University of Sindh, Jomshoro, Pakistan.

<sup>11</sup> Purwanto, 1993. *Psikologi Pendidikan*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya , hlm.71

<sup>12</sup> Sardiman A,m, 2012. *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta : Rajawali,hlm 75.

kasus-kasus perpolitikan, sehingga pada usianya yang dewasa ia mengambil sikap politiknya dengan cara bergabung dengan gerakan perlawanan untuk memperjuangkan dan membela hak-hak kemanusiaan.<sup>13</sup>

### **5.1.9 Peran Perempuan Pada Masa Konflik**

Berikut ini adalah beberapa peran perempuan pada masa konflik berlangsung dan pasca konflik:

1) Melakukan pendampingan.

Pada masa konflik, perempuan melakukan pendampingan khususnya terhadap perempuan yang mengalami tekanan dan berbagai tindak kekerasan. Dampingan yang diberikan kepada korban biasanya dalam bentuk psikologis, seperti motivasi dan penguatan mental.

2) Memberikan pendidikan kritis.

Dalam menjalankan aktivitas pendampingan, aktivis perempuan juga melakukan pendidikan kritis untuk membangun kesadaran masyarakat menentang kekerasan konflik.

3) Berjuang di ranah domestik dan publik, baik fisik maupun non fisik.

Selama konflik berlangsung banyak perempuan mengalami penindasan, banyak suami yang pergi meninggalkan istri dan anak-anak serta keluarganya yang lain, seperti ibu dan saudara perempuannya. Kondisi seperti ini sangat riskan oleh perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di era konflik, aktivis perempuan secara terang-terangan. Karena berdasarkan pengalaman yang ada, banyak perempuan melakukan pendampingan secara terang-terangan ditangkap oleh pihak yang bertikai. Di era konflik, aktivis dianggap satu bentuk afiliasi terhadap salah satu pihak yang bertikai. Dengan demikian aktivis yang ingin tetap eksis dan bisa berkiprah harus bergerak secara diam-diam dan menjaga netralitas mereka. Pada masa konflik aktivis perempuan merelakan rumahnya sendiri menjadi rumah aman (*shelter*) bagi

---

<sup>13</sup>Ismiati, 2016. *Eksistensi Aktiv Perempuan Dalam Mewujudkan Perdamaian Aceh*. Aceh: UIN Ar-Raniry

perempuan korban konflik, terutama bagi korban perkosaan. Disamping itu juga mereka membangun jaringan untuk perlindungan dan memberi keamanan pada perempuan korban. Mereka berusaha melindungi korban dengan berbagai cara. Selain itu mereka menggalang dana untuk membantu para pengungsi. Hal ini dapat dilihat dengan usaha-usaha aktivis dalam memberikan bantuan kepada korban, mulanya dari keingintahuan kemudian membantu dengan mencari bantuan dana bagi pengungsi, dan mendampingi korban pelecehan seksual khususnya bagi perempuan korban konflik.

#### 4) Peran Perempuan Pada Masa Inisiasi Damai.

Uniform Asia Timur dan Asia Tenggara mencatat bahwa bagi perempuan pada masa konflik, perdamaian bermakna suatu kebebasan. Bebas dalam beraktivitas, bertani, berbisnis bepergian dan berkarya. Bagi perempuan ruang konflik adalah ruang penderitaan. Karenanya perempuan yang paling menderita akibat konflik. Menuju perdamaian setidaknya melalui berbagai fase yang dalam siklus perdamaian. Dikenal tiga fase: *peace making*, *peace keeping* dan *peace building* dalam fase-fase tersebut perempuan selalu mengambil peran-peran strategis, fase *peace making*, perempuan berperan sebagai negosiator damai dia juga bisa berperan sebagai pembebas tawanan dan menjadi dapur umum kesehatan. Namun demikian kelompok perempuan yang memperjuangkan perdamaian senantiasa diawali dengan membangun semangat bersama, membuat komitmen dan memperkuat konsolidasi. Kemudian kemampuan perempuan dalam bernegosiasi sudah dibuktikan dari masa ke masa, baik pada saat perang sedang berkecamuk masa konflik maupun dalam proses inisiasi menuju damai. Menjadi negosiator perempuan telah melakukan berbagai upaya untuk membangun wacana damai.

Damai adalah kata yang sarat dengan kenyamanan. Lamanya masa konflik bukanlah keadaan yang menguntungkan, banyaknya kerusakan tidak hanya korban nyawa, bangunan fisik, instansi-instansi yang mencerdaskan, lembaga pendidikan,

rusaknya kultur sosial masyarakat, meningkatnya kemiskinan, trauma yang berkepanjangan, hancurnya peradaban, sesuatu yang tidak dapat dihindari dan bukan diinginkan oleh siapapun. Situasi damai dan sejahtera sesungguhnya adalah keinginan naluri fitri setiap manusia. Damai dipahami bukan sekedar kondisi bebas dari peperangan, penindasan, dan kekerasan belaka. Lebih luas lagi, perdamaian seharusnya dapat mendorong terciptanya keadilan yang seimbang atas hak-hak warga negara secara proporsional.

Perempuan menanggung beban yang berat dalam situasi konflik. Ketika laki-laki terpaksa harus dibunuh atau hal lainnya. Ini berarti dia meninggalkan istri dan anak-anaknya. Sebagai konsekuensinya adalah perempuan mengambil alih tugas kepala rumah tangga. Padahal sebelumnya, kebanyakan masyarakat memahami perempuan hanya untuk mengurus tugas-tugas di dalam rumah tangga atau tugas domestik. Pada posisi tersebut sesungguhnya perempuan sudah berada pada dua peran ganda, peran sebagai pencari nafkah sekaligus mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Belum lagi, jika pada saat yang bersamaan perempuan terlibat dalam proses perjuangan. Baik itu perjuangan bersenjata, perjuangan menegakkan hak yang terlanggar pada diri dan keluarganya ataupun perjuangan.

Dalam terjadinya sebuah konflik, mayoritas pihak yang ikut terlibat langsung di dalamnya ialah laki-laki. Kaum laki-laki kerap kali diikutsertakan dalam terjadinya sebuah konflik sebagai seorang tentara, relawan perang dan sebagainya, sedangkan pihak perempuan hanya dapat menyaksikan hal tersebut tanpa diperbolehkan untuk memiliki peranan yang sama seperti apa yang laki-laki kerjakan. Pihak perempuan juga kerap kali menjadi korban yang terkena dampak langsung dari terjadinya perang ini. Namun, dibalik hal tersebut perempuan juga mampu berperan sebagai penggagas terjadinya sebuah konflik yang terjadi di suatu wilayah. Dalam proses resolusi konflik, keterlibatan perempuan perlu diutamakan bukan hanya untuk kepentingan berbasis gender yang berujung kepada kepentingan perempuan saja, namun juga diharapkan untuk melancarkan upaya perdamaian dengan adanya peran perempuan

dalam upaya mengatasi konflik diharapkan juga cepat diatasi dan memiliki prespektif yang berkeadilan gender.

Dalam beberapa konflik yang terjadi di berbagai negara seringkali warga sipil dijadikan targetnya. Selain itu, pemamfaatan anak-anak untuk menjadi tentara serta untuk menjadi tentara serta kekerasan terhadap etnis dan kelompok agama. Hal tersebut ternyata persis seperti yang mereka lakukan terhadap kejahatan yang berbasis gender dan kekerasan seksual yang sudah sangat umum terjadi. Suatu pengalaman yang lebih spesifik yang dialami oleh perempuan dan anak-anak perempuan berkaitan langsung dengan status mereka ditengah masyarakat. Pernyataan tersebut diperkuat diperkuat dengan *Beijing Platform for Action* yang mana mengatakan apabila ketika seluruh kelompok berjuang sebgai suatu konsekuensi dari terjadinya terorisme dan konflik bersenjata, perempuan dan anak-anak perempuan terutama terpengaruh karena status mereka dan jenis kelamin mereka.

#### **5.1.10 Peran Perempuan dan Anak dalam Wilayah Konflik (Papua)**

Indonesia merupakan salah satu negara memiliki keragaman suku, bahasa dan budaya, disertai dengan adanya perbedaan latar belakang pendidikan sehingga membentuk masyarakat yang majemuk dan heterogen, di mana tentunya mempengaruhi perilaku setiap warga masyarakat seperti ini sangat berpotensi terjadinya konflik sosial yang senantiasa mengarah pada tindak kekerasan fisik maupun psikis.

Situasi konflik sosial yang lazim terjadi, khususnya di wilayah Provinsi Papua masuk dalam beberapa kategori konflik sosial sesama masyarakat antar kelompok suku, wilayah dan antar masyarakat dan kelompok militer, yang disebabkan oleh berbagai alasan. Fakta menunjukkan bahwa konflik membawa kerugian nyawa manusia dan juga harta benda. ketika konflik bersenjata terjadi di Kabupaten Nduga selama kurang lebih 8 bulan, mayoritas masyarakat Nduga termasuk anak-anak, terpaksa harus mengungsi di hutan belantara pegunungan tengah. Bahkan terdapat beberapa perempuan yang terpaksa melakukan persalinan di tengah hutan. Salah satu perempuan dari 2000 pengungsi Nduga, Ibu Jubiana (ibu dari 4 orang anak di

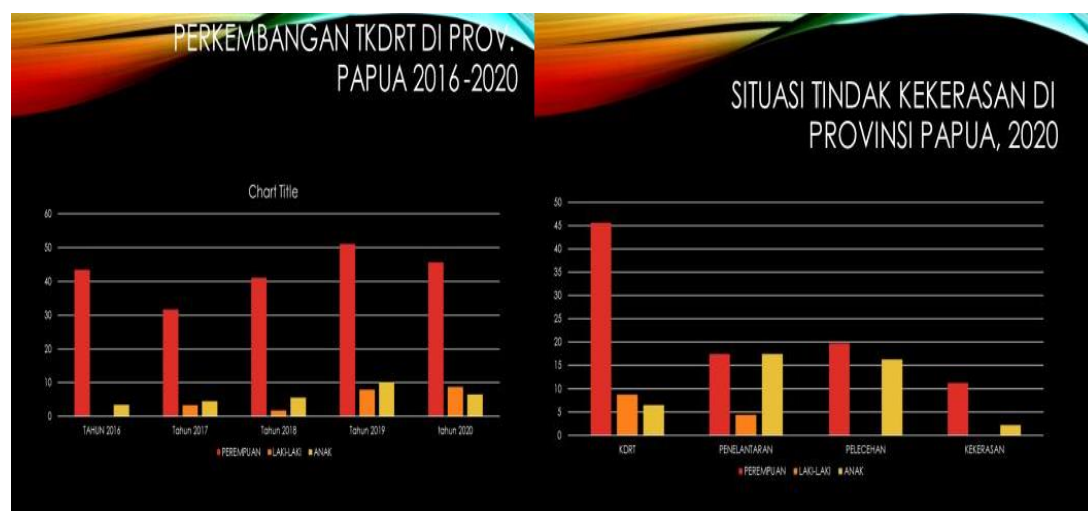
Distrik Mugi) melahirkan seorang anak perempuan di dalam situasi perjalanan pengungsian ditengah hutan yang diberi nama “Pengungsi”. Kehidupan bayi “Pengungsi” selanjutnya dalam pengungsian, hanya dibalut dengan anyaman daun pandan hutan.<sup>14</sup>

Gambar 2. Jubiana dan Bayi Pengungsi  
Nduga

Gambar 3. Masyarakat pengungsi di



Tabel 1. Angka kekerasan di Provinsi Papua



<sup>14</sup> Kemenlu RI, 2021. *Kemenlu Dorong Peran Perempuan sebagai Negosiator dan Mediator Perdamaian di Asia Tenggara.*



Angka kekerasan yang tinggi di Provinsi Papua, juga dapat disebabkan oleh karena adanya konflik sosial yang berkepanjangan, terutama pada beberapa wilayah rawan konflik di Provinsi Papua. Korban dari konflik ini tidak saja dalam bentuk kekerasan fisik dan psikologis, tetapi juga dapat berbentuk penelantaran keluarga (ekonomi/kesejahteraan). Sebagaimana yang ditunjukkan oleh data yang ditampilkan di atas bahwa 16,66 persen merupakan penelantaran

#### **5.1.11 Peran Perempuan dalam Wilayah Konflik di Papua**

Sebagaimana yang telah dielaborasi sebelumnya bahwa perempuan dan anak tidak hanya menjadi korban dalam suatu konflik sosial, tetapi dapat juga terlibat menjadi pendamai antara kelompok yang bertikai. Hal ini terbukti pada beberapa peristiwa di beberapa negara, secara konflik yang terjadi di beberapa negara, secara nasional dan bahkan terjadi juga di dalam wilayah Provinsi Papua dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Secara nasional, komitmen pemerintah Indonesia terkait pelibatan perempuan dalam proses penyelesaian konflik sosial ditunjukkan dengan adanya Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) dan merupakan pemberi kontribusi terhadap beberapa konflik yang terjadi di negara Indonesia. Bahkan merupakan *peacekeepers* perempuan terbesar ke-7 di dunia dan ke-1 se Asia Tenggara.<sup>15</sup>

Adapun kontribusi perempuan dalam beragam ranah konflik, sebagai berikut:<sup>16</sup>

##### **1. Inisiator Perdamaian**

Ketika terjadi suatu konflik sosial, pihak pemerintah berupaya untuk mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan, dengan melakukan berbagai

---

<sup>15</sup> Kemen PPPA RI, 2017; *Pentingnya Peran Perempuan sebagai Penjaga Perdamaian dan Juru Runding Dalam Memerangi Konflik Ketegangan Sosial*,

<sup>16</sup> Sentiela, dkk, 2014, *Peran-peran Perempuan di Wilayah Konflik antara Korban, Penyintas, dan Agen Perdamaian*, Jurnal Masyarakat & Budaya, Vol. 16 No. 3 Tahun 2014.

mediasi untuk mendamaikan semua pihak yang bertikai. Menurut hasil penelitian tentang resolusi konflik yang responsif gender, tahap penyelesaian beberapa konflik, figur perempuan tampil melalui *soft character* yang dapat membangun kepercayaan dari semua pihak yang bertikai, sehingga menjadi jembatan emas (*golden bridge*) bagi terwujudnya perdamaian suatu konflik dengan baik. Sekalipun menurut konsep gender, sebagian besar *public role* lebih didominasi oleh kaum laki-laki ketimbang perempuan, dan kondisi konflik, sebagai besar aktor yang terlibat dalam konflik itu juga laki-laki, namun ketika berada pada tahapan resolusi konflik, sosok perempuan yang mampu untuk tampil sebagai pendamai yang tepat.

## 2. Negosiator

Penyelesaian suatu konflik, tidak saja membutuhkan seorang inisiator perdamaian yang memiliki kemampuan leadership yang baik, namun juga membutuhkan seorang negosiator yang memiliki pengalaman kemampuan untuk mendengarkan, mengamati, dan tidak hanya menghakimi mereka yang terdampak konflik. Kemampuan ini lazimnya dimiliki oleh kaum perempuan yang selalu sabar dalam menghadapi situasi konflik, serta dapat berperan sebagai seorang negosiator bagi semua pihak. Hal ini telah dijalankan oleh salah seorang anggota *Steering Committee SEANWPNM* Indonesia, Shadia Marhaban, yang masuk dalam tim negosiasi perdamaian di Aceh, menyatakan bahwa komitmen terhadap kesepakatan perdamaian merupakan kunci bagi penyelesaian sengketa. Seorang perempuan cenderung untuk mempertahankan komitmennya dan tidak mudah dipengaruhi berbagai kepentingan pribadi, politik atau golongan tertentu.

## 3. Penyedia Kebutuhan Primer Korban

Sehubungan dengan peran gender yang lebih sering dieksekusi oleh kaum perempuan adalah peran reproduktif yang memperhatikan berbagai kebutuhan primer para korban, terutama anak-anak, perempuan, lanjut usia, dan kelompok difabel yang biasanya terabaikan oleh pihak yang berkompeten. Pada saat konflik, para relawati lebih jeli untuk memperhatikan kebutuhan primer, tetapi juga dapat

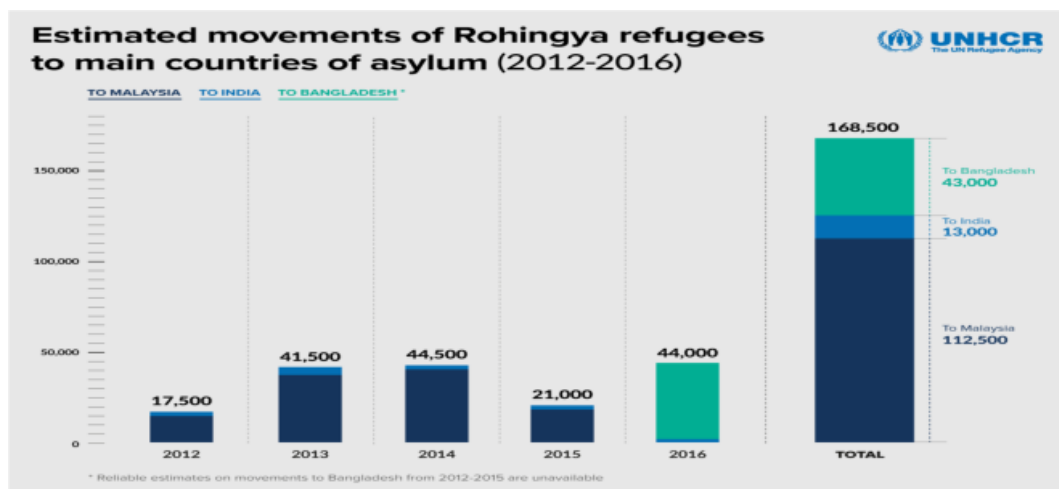
memainkan peran sebagai inisator dan negosiator bagi semua pihak, sehingga dapat mencapai perdamaian.

## **5.2 Upaya *ASEAN Institute for Peace and Security (AIPR)* untuk Meningkatkan Peran Perempuan dalam Penyelesaian Konflik di Asia Tenggara Tahun 2016-2020**

Gender merupakan suatu sifat yang telah melekat baik bagi perempuan maupun laki-laki dikarenakan terbentuknya suatu konstruksi sosial maupun kultural. Melalui pengertian ini seringkali masyarakat mengkotak-kotakan berbagai perbedaan antara perempuan dan laki-laki, seperti perempuan identik dengan lemah dan tidak berdaya sedangkan laki-laki dikonstruksikan sebagai sosok yang kuat dan pemberani. Hal ini yang tertanam pada persepsi kebanyakan orang dan pada akhirnya memberikan kerugian bagi beberapa pihak perempuan.

Senada dengan apa yang dialami oleh berbagai perempuan yang berada di dalam satu wilayah konflik, hal ini serupa ternyata dialami oleh perempuan Rohingya. Perempuan Rohingya kerap kali menjadi korban dari berbagai kekerasan termasuk kekerasan seksual. Sejak puluhan tahun yang lalu atau sejak hari pertama terjadinya konflik yang melibatkan etnis Rohingya dengan etnis Burma (salah satu etnis mayoritas di Myanmar). Perempuan dan anak-anak merupakan berbagai pihak yang terkena langsung dari terjadinya konflik tersebut. Ketika konflik Rohingya ini pecah kembali di tahun 2012., lagi-lagi perempuan menjadi korban dari tentara Burma, perempuan disana mengalami penyiksaan baik hanya sebatas penyiksaan fisiknya saja hingga dalam bentuk kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Untuk mencegah kekerasan tersebut, para masyarakat etnis Rohingnya memutuskan untuk pergi dari wilayahnya. Para masyarakat etnis Rohingnya melakukan pengungsian ke berbagai negara salah satunya adalah Bangladesh, para perempuan Rohingya yang termasuk dalam etnis tersebut menempati berbagai kamp-kamp pengungsian yang terdapat di berbagai Negara.

Masyarakat yang melakukan pengungsian ke berbagai Negara ini umumnya merupakan korban dari kekerasan yang ada di wilayah Rakhine, atau tempat mayoritas dari etnis Rohingya ini bermukim. Kekerasan yang dialami oleh masyarakat Rohingya ini seolah tidak pandang bulu baik perempuan dan laki-laki mengalami hal yang sama. Hanya saja, jenis kekerasan yang menimpah kaum perempuan cenderung kerarah kekerasan yang berbasis gender (*gender violence*). Kekerasan ini mengakibatkan perempuan mengalami berbagai macam pelecehan seksual dari pihak yang sedang bertikai, tidak memandang apabila perempuan masih dibawah umur, atau bahkan sudah memiliki suami.



**Grafik 1. Estimasi Perpindahan Pengungsi Rohingya ke Negara-negara Tujuan**

Sumber: *UNHCR Report: Mixed Movements in South- East Asia 2016*

Data di atas merupakan grafik jumlah pengungsi di berbagai Negara di Asia, yaitu India, Bangladesh dan Malaysia. Dapat dilihat dari grafik diatas bahwa terjadi peningkatan jumlah pengungsi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 terdapat 17.500 pengungsi yang hanya tersebar pada wilayah Malaysia. Hal yang terlihat mencolok terdapat pada data di tahun 2016, di mana dari total 44.000 jumlah pengungsian ke

sejumlah Negara, sebanyak lebih dari 80% dari total tersebut menjatuhkan pilihannya ke wilayah Bangladesh yang merupakan wilayah terdekat dengan Rakhine tempat dimanan konflik Rohingya terjadi.

Melalui data tersebut, dapat terlihat bahwa jumlah pengungsi Rohingya yang tersebar di berbagai Negara ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebanyak 60% dari total pengungsi tersebut merupakan perempuan, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah. Perempuan-perempuan tersebut melakukan pelarian ke wilayah lain dikarenakan rasa tidak aman dan terancam yang mereka dapatkan dari situasi di wilayah tersebut. Tidak hanya perempuan, anak-anak juga menjadi sasaran mereka dalam melakukan kekerasan kepada etnis Rohingya, hal tersebut telah masuk ke dalam *fase ethnic cleansing* atau genosida.<sup>17</sup>

## **Grafik 2. Grafik Pertumbuhan Pengungsi Rohingya Di Bangladesh**

### **Tahun 2017-2018**

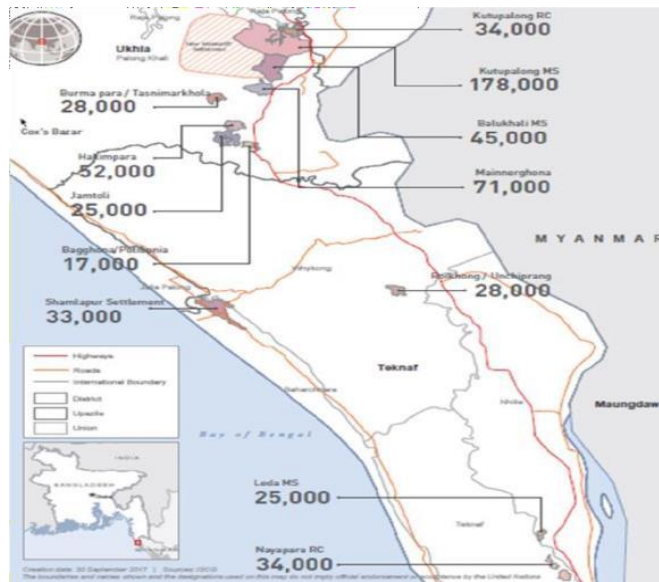
Sumber: *UNHCR Operational Portal Refugee Situation 2018*

Data yang dikeluarkan oleh UNHCR mencatat pada tahun 2017 jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh melonjak tajam menyentuh angka 724.920 orang dimana terdapat 168.708 orang kepala keluarga di dalamnya, sedangkan di tahun 2018 angka tersebut meningkat drastis ke angka 891.233 jiwa serta terdapat 205.290 kepala keluarga, dimana terdapat 51,9 % dari total pengungsi diatas adalah perempuan. Pada data dikeluarkan UNHCR ini menyebutkan apabila perempuan menjadi jenis kelamin mayoritas para pengungsi Rohingya ini dapat terlihat grafiknya yang melonjat pesat dibandingkan dengan jumlah pengungsi di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa situasi di wilayah konflik sangat sudah tidak kondusif untuk di tempati.

---

<sup>17</sup> UNHCR ReportMixed, 2016. *Movements in South- East Asia 2016*.  
<https://reporting.unhcr.org> Diakses pada 11 November 2021

**Gambar 1. Persebaran pengungsi Rohingya di Bangladesh**



Gambar di atas merupakan peta persebaran para pengungsi Rohingya di Bangladesh pada tahun 2017. Dalam peta tersebut diketahui bahwa terdapat 12 titik atau lokasi persebaran Rohingya di Bangladesh, di mana wilayah Kutupalong MS menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak sejumlah 178.000 jiwa.<sup>18</sup>

### **Perempuan sebagai Agen Perubahan**

Dalam melaksanakan peran sebagai agen perubahan ini, perempuan menggunakan kesempatan politiknya, perempuan Myanmar ikut berpartisipasi dalam sistem pemerintahan Negara tersebut, yang dibuktikan dengan terdapatnya Aung San Suu Kyi sebagai salah satu tokoh perempuan dalam parlemen Myanmar. Namun tingkat partisipasi perempuan dalam pemerintahan Myanmar ini masih tergolong rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan persentase keikutsertaan perempuan dalam

<sup>18</sup> Inter Sector Coordination Group. *Humanitarian Response Plan September 2017 – February 2018, 30 September 2017 via Mission report of OHCHR rapid response mission to Cox's Bazar, Bangladesh.*

semua kursi pemerintahan hanya sekitar 13% dari total keseluruhan penduduk Myanmar yang berjumlah 52 juta orang.<sup>19</sup>

Ketika dikaitkan dengan kasus Rohingya, perempuan di wilayah konflik ini umumnya menjadi korban yang mengalami kekerasan berdasarkan gender. Dalam kasus yang terjadi di Rohingya ini memang peran perempuan sebagai agen perubahan belum begitu mencolok dan masih didominasi oleh berbagai data yang menyebutkan bahwa perempuan hanyalah sebagai korban dalam konflik ini. Namun, ternyata terdapat beberapa pihak baik itu dari individual maupun kelompok aktivis yang telah ataupun sedang memperjuangkan hak-hak perempuan Rohingya ini, salah satunya adalah Wai Wai Nu.

Wai Wai Nu merupakan seorang aktivis Myanmar keturunan Rohingya yang aktif dalam mengkampanyekan hak-hak perempuan khususnya perempuan yang berada di wilayah konflik Rakhine. Wai Wai Nu mendirikan sebuah NGO yang bernama *Women's Peace Network Arakan*. NGO ini dibentuk dalam rangka mempromosikan pengertian yang lebih baik antara etnis Rohingya dengan masyarakat lain yang tinggal di wilayah Rakhine, selain bergerak di dalam negeri, Organisasi *Women's Peace Network Arakan* juga menjangkau luar negeri dalam rangka merangkul masyarakat dari segala kalangan serta mencoba untuk menciptakan perdamaian dan lingkungan yang aman bagi semua orang.

Selain Wai Wai Nu, adapun kontribusi pihak perempuan lain sebagai agen perubahan pada konflik di Rohingya. *Karen Women's Organization*, merupakan salah satu organisasi yang juga mempunyai peranan penting dalam menjadi agen perubahan di Rohingya *Karen Women's Organization* ini dibentuk pada tahun 1949 yang memiliki tujuan awal untuk memperjuangkan hak-hak perempuan pada konflik internal yang terjadi di Karen. Namun, seiring berjalannya waktu, KWO memperluas fokusnya tidak hanya pada perempuan Karen melainkan kepada seluruh perempuan yang terjebak dalam wilayah konflik, salah satunya Rohingya. Organisasi non-

---

<sup>19</sup> UN Women Asia and the Pacific, 2016

pemerintah ini memiliki peranan dalam proses resolusi konflik Rohingya di Myanmar. Salah satu tindakan yang dilakukan *Karen Women's Organization* ini adalah mengirimkan sebuah pernyataan terhadap beberapa pihak yang terkait.

*Karen Women's Organization* menyampaikan surat terbuka kepada beberapa tokoh penting di pemerintahan seperti *People's Assembly Pyithu Hluttaw*, *House of Nationalities Amyotha Hluttaw*, *The State Conselor of Myanmar* Daw Aung San Suu Kyi serta seluruh perwakilan etnis yang berada di Myanmar untuk mengakhiri pembatasan kewarganegaraan serta kebebasan bagi masyarakat Rohingya. Dalam hal ini pihak KWO meminta agar para petinggi Negara tersebut untuk mengambil tindakan bagi proses perdamaian terhadap konflik tersebut. Pihak KWO berpendapat bahwa pihak militer Burma tidak seharusnya dibiarkan berlanjut dengan impunitas. Menurutnya, ini merupakan saat yang tepat bagi semua pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan dalam hal hak etnis serta sistem pemerintahan yang berpihak pada setiap etnis dan kalangan, termasuk Rohingya.

Selama tahun 2016 pihak KWO terus menerima laporan-laporan yang menyangkut soal penyiksaan, pembunuhan, serta kehilangan yang dialami oleh kelompok Rohingya. Hal yang terjadi pada kelompok Rohingya ini merupakan perbuatan dari para tentara Burma yang menginvasi wilayah mereka. Setidaknya, pada tahun 2016 tercatat terdapat sebanyak 428 kasus kematian serta 192 kasus penghilangan masyarakat Rohingya.<sup>20</sup>

### **Perempuan dan Negosiasi dalam prespektif Feminisme**

Feminisme secara umum merupakan rangkaian pemikiran yang secara eksplisit mengakui perempuan yang ter subordinasi oleh laki-laki. Feminisme menyadari pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi dari masyarakat dan tidak bersifat alami/bawaan. Feminisme merupakan konsep yang

---

<sup>20</sup> Burma Task Force, 2016



percaya bahwa suara perempuan berharga dan suara perempuan harus diwakili oleh perempuan.<sup>21</sup>

Keyakinan bahwa keterlibatan perempuan dalam negosiasi konflik akan membawa dampak berbeda yang lebih positif diyakini karena pertama, secara alami perempuan memang memiliki sifat bawaan yang damai mencintai kedamaian. Kedua, perempuan telah melewati proses pembangunan karakter yang berbeda jika dibandingkan dengan laki-laki. Karakteristik biologis laki-laki membuat mereka cenderung bersifat agresif, dan berambisi untuk mendominasi pihak lain. Karakter tersebut merupakan dua karakter yang merepresentasikan perang. Tidak hanya itu, kecenderungan untuk memperkosa dan menaklukkan perempuan berasal dari karakteristik biologis laki-laki atas perempuan. Faktanya tindakan pemerkosaan sering dijadikan salah satu senjata untuk melumpuhkan lawan dalam situasi perang.<sup>22</sup>

*Maternal thinking* yang dimiliki seorang individu sangat merefleksikan perdamaian dan resolusi konflik. Beruntungnya, *Maternal thinking* lebih menonjol pada perempuan yang melahirkan kehidupan baru (anak), kemudian mengasuhnya, sehingga memiliki keterikatan emosional yang mendalam antara ibu dan anak. Selanjutnya, perempuan yang feminis dan mengerti akan nilai-nilai feminisme cenderung kritis dan lebih melibatkan diri dalam proses penciptaan perdamaian karena kelompok perempuan ini paranoid akan konflik. Feminisme lebih menekankan pada kesetaraan dan keadilan, tanpa memperhatikan isu-isu bersifat hirarki dan usaha dominasi atas Negara/aktor lain.

Pada dasarnya, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi gaya negosiasi setiap orang, di antaranya karakter/personality, budaya, dan gender. Dalam model negosiasi, perempuan dianggap lebih kooperatif sedangkan laki-laki lebih kompetitif. Menurut Wyatt perempuan bernegosiasi dengan berlandaskan keadilan bagi kedua

---

<sup>21</sup> Nur Azizah, 2017. *Gender dan Politik*, The Phinisi Press: Yogyakarta

<sup>22</sup> Anastazia Niatri Wattinena.2021. *Pengaruh Feminitas Perempuan dalam Negosiasi Konflik*. Volume 1 No 1 <https://unimuda.e-journal.id/jurnalhubunganinternasional/article/view/1509>

belah pihak sedangkan laki-laki bernegosiasi untuk menang. Menurut Lewicki ada lima perbedaan dalam model negosiasi berdasarkan gender, yakni:<sup>23</sup>

- 1) Dalam konteks negosiasi, perempuan lebih fokus pada hubungan sedangkan laki-laki pada tugas.
- 2) Perempuan dan laki-laki memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Laki-laki fokus pada posisi, sedangkan perempuan terfokus pada informasi personal/pribadi dan emosi
- 3) Ada sebagian fakta lapangan yang membuktikan bahwa perempuan sering diperlakukan lebih buruk dibandingkan laki-laki dalam negosiasi.
- 4) Penggunaan taktik yang sama sering berujung pada hasil yang berbeda, antara laki-laki dan perempuan. Perempuan yang menggunakan taktik pertukaran sering tidak sukses laki-laki.

Stereotaiping terhadap gender akan mempengaruhi performa negosiator dalam negosiasi. Umumnya, negosiator akan berlaku sesuai dengan Stereotaiping yang mereka percayai.

Perempuan memiliki dua peran dalam terjadinya konflik yaitu sebagai korban dan sebagai agen perubahan. Perempuan ketika menjadi korban menerima berbagai kekerasan dari pihak yang terlibat konflik. Salah satu contoh kekerasan yang dialami oleh perempuan adalah kekerasan berbasis gender atau yang lebih dikenal sebagai *Sexual Gender Based Violence*. Namun, dibalik peran perempuan sebagai korban ini perempuan mampu menunjukkan perannya sebagai agen perubahan khususnya dalam konflik di Rohingya dilakukan oleh Wai Wai Nu dan *Karen Women's Organization* melakukan berbagai kritik terhadap pemerintah Myanmar agar cepat melakukan proses perdamaian agar tidak lebih banak korban yang jatuh terutama perempuan sebagai mayoritas korban.

---

<sup>23</sup> *Ibid*

Salah satu poin penting yang ditekankan Kementerian Luar Negeri RI dalam Meningkatkan Keselamatan dan Kinerja Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah pemajuan peranan perempuan. Itu karena perempuan memegang peranan penting dalam pencegahan konflik, manajemen konflik, dan bina damai setelah konflik.

Dalam hal ini, Indonesia telah menyelenggarakan program pelatihan regional tentang Women, Peace, and Security (WPS) di Jakarta. Pelatihan ini dihadiri oleh 60 diplomat wanita dari negara-negara anggota ASEAN, Timor Leste dan Papua Nugini. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan kembali perlunya para pemimpin ASEAN untuk bergerak maju dengan mengimplementasikan agenda WPS di Asia Tenggara, menekankan pentingnya melibatkan lebih banyak perempuan dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB. SEANWPNM adalah jejaring negosiator dan mediator wanita di Asia Tenggara yang pembentukannya diprakarsai oleh Indonesia sejak tahun 2019, sebagai langkah penting dalam meningkatkan peran perempuan di bidang perdamaian

Komitmen Indonesia terhadap pelibatan perempuan dalam proses penyelesaian konflik pun tidak tanggung-tanggung. Indonesia telah memiliki RAN P3AKS (Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial) dan tercatat sebagai penyumbang *women peacekeepers* atau agen penjaga perdamaian perempuan.